

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TA. 2022



Jl. Swarna Bumi No. 03 Telp. (0768) 21984

E- mail : inhil_bpbd@yahoo.com

Disusun oleh EKA RISANDY, SE, M. Ak

KATA PENGANTAR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial khususnya penanggulangan bencana Daerah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Sebagai salah satu entitas akuntansi yang berada di bawah Sekretariat Daerah, Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk wujud tanggungjawab Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya seperti yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Laporan ini juga sebagai bukti komitmen mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk semakin meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Tembilahan, 31 Desember 2022

Mengetahui,
KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

YUSPIK, SH
NIP.19640614 199603 1 003

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD ;
2. Laporan Operasional (LO) SKPD ;
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD ;
4. Neraca SKPD ;
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD ;

sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tembilahan, 31 Desember 2022

Mengetahui,
KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

YUSPIK, SH
NIP.19640614 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAPORAN	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
NERACA	2
LAPORAN OPERASIONAL	4
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	7
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	8
C. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.....	9
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	11
A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	11
B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.....	16
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	18
A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.....	18
B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	18
C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	19
D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Dinas Kominfo Provinsi Riau.....	19
I. Penjelasan Komponen Utama Laporan Realisasi Anggaran.....	20
1. Pendapatan - LRA.....	20
2. Belanja - LRA.....	21
II. Penjelasan Komponen Utama Laporan Operasional.....	22
1. Pendapatan - LO.....	22
2. Beban - LO.....	23
3. Surplus/Defisit – LO dan Pos Luar Biasa.....	25
III. Penjelasan Komponen Utama Neraca.....	25
1. Aset Lancar.....	25
2. Aset Tetap.....	27
3. Aset Lainnya.....	28

4. Kewajiban.....	29
5. Ekuitas	30
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	31
A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	31
I. Pendapatan	31
1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	31
II. Belanja.....	31
2.1 Belanja Operasi	32
2.1.1 Belanja Pegawai.....	32
2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa.....	33
2.2 Belanja Modal	35
2.2.1 Belanja Modal – Tanah.....	36
2.2.2 Belanja Modal – Peralatan dan Mesin	36
2.2.3 Belanja Modal – Gedung dan Bangunan	37
2.2.4 Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	38
2.2.5 Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya	38
2.2.6 Belanja Modal – Aset Lainnya	38
B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	39
I. Pendapatan - LO.....	39
1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	39
II. Beban - LO	40
2.1 Beban Pegawai	40
2.2 Beban Persediaan.....	41
2.3 Beban Barang	41
2.4 Beban Jasa.....	42
2.5 Beban Pemeliharaan	42
2.6 Beban Perjalanan Dinas	43
2.7 Beban Barang Yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	43
2.8 Beban Hibah	43
2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi	43
2.10Beban Lain-Lain	45
III. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional.....	45
IV. Pos Luar Biasa.....	46
V. Surplus/Defisit - LO.....	46
C. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
I. Ekuitas Awal	47
II. Surplus/Defisit - LO.....	47
III. RK - PPKD.....	47
IV. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	47
V. Ekuitas Akhir.....	47

D. Penjelasan Pos-Pos Neraca	48
I. Aset.....	48
1. Aset Lancar	48
1.1 Kas di Bendahara Penerimaan	49
1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	49
1.3 Piutang Pendapatan.....	50
1.4 Piutang Lain-Lain	50
1.5 Penyisihan Piutang.....	50
1.6 Beban Dibayar Dimuka.....	51
1.7 Persediaan.....	51
2. Aset Tetap	52
2.1 Tanah.....	53
2.2 Peralatan dan Mesin	53
2.3 Gedung dan Bangunan.....	58
2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	58
2.5 Aset Tetap Lainnya	59
2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan.....	59
2.7 Akumulasi Penyusutan	59
3. Aset Lainnya	60
II. Kewajiban	60
1. Kewajiban Jangka Pendek	60
1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	61
1.2 Pendapatan Diterima Dimuka.....	62
1.3 Utang Belanja	62
1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	62
III. Ekuitas	63
BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	65
A. Domisili dan Bentuk Hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	65
B. Visi, Misi dan Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	66
C. Susunan Organisasi	67
D. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan	68
BAB VI PENUTUP	69
LAMPIRAN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN	70

DAFTAR LAPORAN

	Hal
Laporan 1 : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	68
Laporan 2 : Laporan Operasional (LO)	70
Laporan 3 : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	72
Laporan 4 : Neraca Format SAP	73

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022	75
Lampiran 2 : Rincian Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	79
Lampiran 3 : Rincian Belanja pada Laporan Operasional (LO)	83
Lampiran 2 : Daftar Persediaan Per 31 Desember 2022	87
Lampiran 3 : Tabel Penyusutan Aset Tahun 2022	88
Lampiran 4 : Daftar Aset Lain-Lain Tahun 2022	137

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 menggambarkan perbandingan antara anggaran APBD tahun 2022 dengan realisasinya selama Semester Pertama tahun anggaran.

Anggaran Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp.8.110.091.840,00,- dan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.8.337.090.839,00- sedangkan Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp.7.716.093.204,00,- atau mencapai 92.55% dari anggarannya.

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang tercermin dalam Pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional selama tahun 2022 yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Jumlah Pendapatan-LO Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada TA 2022 adalah sebesar Rp.332.828.571,43- sedangkan jumlah Beban TA 2022 adalah sebesar Rp. 10.184.630.036,82- sehingga terjadi Defisit LO sebesar Rp. 9.851.801.465,39-.

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada TA 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jumlah Ekuitas Akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 adalah sebesar [Rp. 3.821.738.505,78,-](#).

4. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tahun 2022.

Jumlah Aset per [31 Desember 2022](#) adalah sebesar [Rp. 3.827.287.320,78-](#) yang terdiri dari Aset Lancar sebesar [Rp. 7.119.695,00-](#) Aset Tetap sebesar [Rp. 3.801.948.575,-](#) dan Aset Lainnya sebesar [Rp. 18.219.050,-](#)

Jumlah Kewajiban per [31 Desember 2022](#) adalah sebesar [Rp. 5.548.815,00,-](#). Jumlah Ekuitas per [31 Desember 2022](#) adalah sebesar [Rp. 3.821.738.505,78-](#).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



SKPD : 1.05.0.00.0.00.03. – BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022 dan 2021



kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH	8.337.090.839,00	7.716.093.204,00	92.55	8.490.624.522,00
2.1.	BELANJA OPERASI	7.983.590.839,00	7.368.733.204,00	92.30	7.133.216.933,00
2.1.01.	Belanja Pegawai	3.898.360.839,00	3.638.381.426,00	93.33	3.386.750.059,00
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.538.356.515,00	2.402.227.426,00	94.64	2.331.420.059,00
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.258.984.324,00	1.140.494.000,00	90.59	963.850.000,00
2.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	101.020.000,00	95.660.000,00	94.69	91.480.000,00
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.085.230.000,00	3.730.351.778,00	91.31	3.746.466.874,00
2.1.02.01.	Belanja Barang	920.042.000,00	892.387.400,00	96.99	904.073.250,00
2.1.02.02.	Belanja Jasa	2.137.995.000,00	2.109.567.604,00	98.67	2.382.015.839,00
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	260.230.000,00	211.775.000,00	81.38	87.270.000,00
2.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	766.963.000,00	516.621.774,00	67.36	373.107.785,00
2.2.	BELANJA MODAL	353.500.000,00	347.360.000,00	98.26	1.357.407.589,00
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	288.500.000,00	282.659.000,00	97.98	132.420.000,00
2.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	191.000.000,00	188.169.000,00	98.52	47.500.000,00
2.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	36.000.000,00	35.575.000,00	98.82	
2.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	4.200.000,00
2.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	31.000.000,00	28.550.000,00	92.10	74.720.000,00
2.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	14.000.000,00	13.965.000,00	99.75	-
2.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	16.500.000,00	16.400.000,00	99.39	6.000.000,00
2.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	64.701.000,00	99.54	14.990.000,00
2.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	65.000.000,00	64.701.000,00	99.54	14.990.000,00
2.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	1.209.697.589,00
2.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	-	1.209.697.589,00
2.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	300.000,00
2.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	-	-	-	300.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.337.090.839,00)	(7.716.093.204,00)	92.55	(8.490.624.522,00)

**Tembilahan, 31 Desember 2022
PENGGUNA ANGGARAN**

**YUSPIK, SH
NIP.19640614 199603 1 003**

NERACA



1.05.0.00.0.00.03. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NERACA



Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 DAN 2021

r a i a n	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
ASET	3.827.287.320,78	10.905.631.600,02
ASET LANCAR	7.119.695,00	7.031.195,00
Persediaan	7.119.695,00	7.031.195,00
Barang Pakai Habis	7.119.695,00	7.031.195,00
ASET TETAP	3.801.948.575,78	10.880.381.355,02
Tanah	666.000.000,00	666.000.000,00
Tanah	666.000.000,00	666.000.000,00
Peralatan dan Mesin	24.671.106.226,67	23.574.943.026,67
Alat Besar	14.531.568.905,67	13.684.644.905,67
Alat Angkutan	6.120.806.235,00	6.084.551.235,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	61.246.000,00	61.246.000,00
Alat Pertanian	4.200.000,00	4.200.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.055.957.669,00	2.907.873.669,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	200.222.450,00	198.234.450,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.705.000,00	23.705.000,00
Komputer	368.532.767,00	351.943.767,00
Alat Keselamatan Kerja	304.867.200,00	258.544.000,00
Gedung dan Bangunan	1.063.352.800,00	2.392.849.754,01
Bangunan Gedung	905.116.000,00	2.234.612.954,01
Tugu Titik Kontrol/Pasti	158.236.800,00	158.236.800,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	567.112.750,00	4.321.344.650,00
Jalan dan Jembatan	408.370.500,00	4.162.602.400,00
Bangunan Air	158.742.250,00	158.742.250,00
Aset Tetap Lainnya	171.955.000,00	171.955.000,00
Bahan Perpustakaan	171.955.000,00	171.955.000,00
Akumulasi Penyusutan	(23.337.578.200,89)	(20.246.711.075,66)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(22.882.432.962,19)	(19.620.300.828,16)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(246.107.528,70)	(282.075.156,50)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(209.037.710,00)	(344.335.091,00)
ASET LAINNYA	18.219.050,00	18.219.050,00
Aset Lain-lain	18.219.050,00	18.219.050,00
Aset Lain-lain	18.219.050,00	18.219.050,00
JUMLAH ASET	3.827.287.320,78	10.905.631.600,02

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2022	2021
1	2	3
KEWAJIBAN	5.548.815,00	5.429.593,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.548.815,00	5.429.593,00
Utang Belanja	5.548.815,00	5.429.593,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	5.548.815,00	5.429.593,00
JUMLAH KEWAJIBAN	5.548.815,00	5.429.593,00
EKUITAS	3.821.738.505,78	10.900.202.007,02
EKUITAS	3.821.738.505,78	10.900.202.007,02
Ekuitas	1.048.790.761,63	10.900.202.007,02
Ekuitas	10.900.202.007,02	10.900.202.007,02
Surplus/Defisit-LO	(9.851.411.245,39)	0
Estimasi Perubahan SAL	7.716.093.204,00	0
Surplus/Defisit-LRA	(7.716.093.204,00)	0
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	2.772.947.744,15	0
RK PPKD	2.772.947.744,15	0
JUMLAH EKUITAS DANA	3.821.738.505,78	10.900.202.007,02
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.827.287.320,78	10.905.631.600,02

Tembilahan, 31 Desember 2022
PENGUNA ANGGARAN

YUSPIK, SH
NIP.19640614 199603 1 003

LAPORAN OPERASIONAL

1.05.0.00.0.00.03. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 DAN 2021

URAIAN		2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1		2	3	4	5
7.	PENDAPATAN DAERAH-LO				
7.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	332.828.571,43	345.500.000,00	-12.671.428,57	-3,81
7.3.01.	Pendapatan Hibah-LO	332.828.571,43	345.500.000,00	-12.671.428,57	-3,81
7.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	332.828.571,43	345.500.000,00	-12.671.428,57	-3,81
7.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	332.828.571,43	345.500.000,00	-12.671.428,57	-3,81
7.Z	JUMLAH PENDAPATAN	332.828.571,43	345.500.000,00	-12.671.428,57	-3,81
8.	BEBAN DAERAH				
8.1.	BEBAN OPERASI	7.365.363.926,00	7.176.247.306,00	189.116.620,00	2,57
8.1.01.	Beban Pegawai	3.638.381.426,00	3.385.570.059,00	252.811.367,00	6,95
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.402.227.426,00	2.331.420.059,00	70.807.367,00	2,95
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.763.418.960,00	1.700.069.560,00	63.349.400,00	3,59
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	189.887.236,00	187.973.573,00	1.913.663,00	1,01
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	145.190.000,00	148.770.000,00	-3.580.000,00	-2,47
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	56.550.000,00	53.045.000,00	3.505.000,00	6,20
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	115.509.900,00	116.306.520,00	-796.620,00	-0,69
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.469.232,00	6.641.413,00	827.819,00	11,08
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	19.109,00	22.731,00	-3.622,00	-18,95
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	109.725.448,00	104.712.272,00	5.013.176,00	4,57
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.614.357,00	3.469.702,00	144.655,00	4,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	10.843.184,00	10.409.288,00	433.896,00	4,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.140.494.000,00	963.850.000,00	176.644.000,00	15,49
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	514.544.000,00	422.300.000,00	92.244.000,00	17,93
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	169.650.000,00	143.550.000,00	26.100.000,00	15,38
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	456.300.000,00	398.000.000,00	58.300.000,00	12,78
8.1.01.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	95.660.000,00	90.300.000,00	5.360.000,00	5,60
8.1.01.03.07.	Beban Honorarium	95.660.000,00	90.300.000,00	5.360.000,00	5,60
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	3.726.982.500,00	3.790.677.247,00	-63.694.747,00	-1,71
8.1.02.01.	Beban Barang	892.298.900,00	947.690.250,00	-55.391.350,00	-6,21
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	892.298.900,00	947.690.250,00	-55.391.350,00	-6,21
8.1.02.02.	Beban Jasa	2.106.286.826,00	2.382.609.212,00	-276.322.386,00	-13,12
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	2.052.486.226,00	2.369.109.212,00	-316.622.986,00	-15,43
8.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.882.600,00	-	3.882.600,00	100,00
8.1.02.02.07.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	13.500.000,00	-13.500.000,00	0,00
8.1.02.02.08.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	49.918.000,00	-	49.918.000,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	211.775.000,00	87.270.000,00	124.505.000,00	58,79
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	211.775.000,00	87.270.000,00	124.505.000,00	58,79
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	516.621.774,00	373.107.785,00	143.513.989,00	27,78
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	516.621.774,00	373.107.785,00	143.513.989,00	27,78

URAIAN		2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1		2	3	4	5
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.806.736.890,82	2.915.963.862,30	-109.226.971,48	-3,89
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.772.037.505,46	2.771.761.637,60	275.867,86	0,01
8.2.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	1.922.355.262,71	1.914.396.119,86	7.959.142,85	0,41
8.2.01.01.03.	Beban Penyusutan Alat Bantu	1.922.355.262,71	1.914.396.119,86	7.959.142,85	0,41
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	536.223.503,15	548.924.003,14	-12.700.499,99	-2,37
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	104.196.253,15	158.021.753,14	-53.825.499,99	-51,66
8.2.01.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	82.250.000,00	41.125.000,00	41.125.000,00	50,00
8.2.01.02.03.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor	349.777.250,00	349.777.250,00	0,00	0,00
8.2.01.03.	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.124.600,00	6.124.600,00	0,00	0,00
8.2.01.03.01.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	6.124.600,00	6.124.600,00	0,00	0,00
8.2.01.04.	Beban Penyusutan Alat Pertanian	1.050.000,00	525.000,00	525.000,00	50,00
8.2.01.04.01.	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	1.050.000,00	525.000,00	525.000,00	50,00
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	287.863.464,60	275.341.464,60	12.522.000,00	4,35
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor	1.483.091,00	1.483.091,00	0,00	0,00
8.2.01.05.02.	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	283.380.373,60	272.358.373,60	11.022.000,00	3,89
8.2.01.05.03.	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
8.2.01.06.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.893.800,00	18.747.200,00	-10.853.400,00	-137,49
8.2.01.06.02.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	7.893.800,00	18.747.200,00	-10.853.400,00	-137,49
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	10.526.875,00	7.703.250,00	2.823.625,00	26,82
8.2.01.10.01.	Beban Penyusutan Komputer Unit	6.507.500,00	4.113.750,00	2.393.750,00	36,78
8.2.01.10.02.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	4.019.375,00	3.589.500,00	429.875,00	10,70
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.827.490,36	47.237.091,70	-27.409.601,34	-138,24
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	16.702.643,80	44.112.245,14	-27.409.601,34	-164,10
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.702.643,80	44.112.245,14	-27.409.601,34	-164,10
8.2.02.04.	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.124.846,56	3.124.846,56	0,00	0,00
8.2.02.04.01.	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	3.124.846,56	3.124.846,56	0,00	0,00
8.2.03.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	14.871.895,00	96.965.133,00	-82.093.238,00	-552,00
8.2.03.01.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	13.098.770,00	88.183.408,00	-75.084.638,00	-573,22
8.2.03.01.01.	Beban Penyusutan Jalan	6.164.200,00	81.248.838,00	-75.084.638,00	-
8.2.03.01.02.	Beban Penyusutan Jembatan	6.934.570,00	6.934.570,00	0,00	1.218,08
8.2.03.02.	Beban Penyusutan Bangunan Air	1.773.125,00	8.781.725,00	-7.008.600,00	-395,27
8.2.03.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	1.773.125,00	1.773.125,00	0,00	0,00
8.2.03.02.04.	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman	-	7.008.600,00	-7.008.600,00	0,00
8.6.	Beban lain-lain				
8.6.01.	Beban lain-lain	12.139.000,00	15.300.000,00	-3.161.000,00	-26,04
8.6.01.01.	Beban lain-lain	12.139.000,00	15.300.000,00	-3.161.000,00	-26,04
8.6.01.01.01.	Beban lain-lain	12.139.000,00	15.300.000,00	-3.161.000,00	-26,04
8.Z	JUMLAH BEBAN	10.184.239.816,82 (9.851.411.245,39)	10.107.511.168,30 (9.762.011.168,30)	76.728.648,52 -89.400.077,09	0,75 0,91

Tembilahan 31 Desember 2022
PENGGUNA ANGGARAN

YUSPIK, SH
NIP. 19640614 199603 1 003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



1.05.0.00.0.00.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022 DAN 2021



URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	10.900.202.007,02	10.900.202.007,02
RK PPKD	2.772.947.744,15	0
Surplus/Defisit-LO	-9.851.411.245,39	0
JUMLAH EKUITAS AKHIR	3.821.738.505,78	10.900.202.007,02

Tembilahan, 31 Desember 2022
PENGGUNA ANGGARAN

YUSPIK, SH
NIP.19640614 199603 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada periode pelaporan.

Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Daerah serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Setiap entitas akuntansi dalam Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

- i. Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis AkruaI.
- j. Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis AkruaI.
- k. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tanggal 30 Desember 2021 tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
- l. Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 tanggal 28 Maret 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

C. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berasal dari dana APBD sebesar **Rp. 8.337.090.839,-** selama tahun anggaran 2022.

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Perubahan APBD tahun 2022 dengan realisasinya tahun 2022. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan dan belanja.

b. Laporan Operasional,

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang tercermin dalam Pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional selama tahun 2022 yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

c. Laporan Perubahan Ekuitas,

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Neraca,

Neraca menggambarkan posisi keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tahun 2022. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 ini mengacu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam rangka menunjang seluruh Kegiatan yang telah diprogramkan pada tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mendapat alokasi dana melalui APBD Perubahan sebesar **Rp. 8.337.090.839,-**. Adapun ringkasan Anggaran serta Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
		Rp	Rp	%	
1	BELANJA	8.337.090.839,00	7.716.093.204,00	92,55	98,84

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Realisasi Fisik sebesar 98,84% sedangkan realisasi keuangan terealisasi sebesar **Rp. 7.716.093.204,00-** atau **92,55%**.

Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 selengkapnya disajikan pada Tabel berikut ini:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.344.900	6.344.900	100,00	100
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.400.000	3.400.000	100,00	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.698.900	1.698.900	100,00	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.246.000	1.246.000	100,00	100
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0,00	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	140.493.600	102.852.200	73,21	99,75
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.200.000	10.200.000	100,00	100,00

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.196.800	6.845.900	95,12	95,12
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.947.000	7.947.000	100,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	28.800	28.800	100,00	100,00
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	36.000	36.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103.085.000	65.794.500	63,83	100,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.797.340.839	3.542.721.426	93,29	99,88413
	Belanja Gaji Pokok PNS	1.867.218.339	1.763.418.960	94,44	100
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	192.486.914	189.887.236	98,65	100
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	149.110.000	145.190.000	97,37	100
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.400.000	0	0,00	0
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	64.232.250	56.550.000	88,04	100
	Belanja Tunjangan Beras PNS	124.235.813	115.509.900	92,98	100
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.620.444	7.469.232	77,64	100
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	39.359	19.109	48,55	100
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	109.725.448	109.725.448	100,00	100
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.340.566	3.614.357	83,27	100
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12.947.382	10.843.184	83,75	100
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	562.334.324	514.544.000	91,50	100
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	204.870.000	169.650.000	82,81	100
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	491.780.000	456.300.000	92,79	100
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	64.217.600	54.113.400	84,27	99,2214
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.500.000	8.500.000	100,00	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.538.000	1.533.800	99,73	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.000.000	1500000	75,00	75
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000	1.440.000	100,00	100
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000	24.000.000	100,00	100
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	57.600	57.600	100,00	100
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	72.000	72.000	100,00	100
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.610.000	17.010.000	63,92	100
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	131.180.000	120.878.000	92,15	99,61887

	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.180.000	680.000	57,63	57,63
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.000.000	33.600.000	84,00	100
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	90.000.000	86.598.000	96,22	100
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.115.000	6.115.000	100,00	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.115.000	6.115.000	100,00	100
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.460.000	82.195.000	96,18	99,20431
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	0	0,00	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.280.000	23.280.000	100,00	100
	Belanja Modal Alat Pendingin	21.000.000	19.600.000	93,33	100
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000	8.950.000	89,50	100
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.000.000	1965000	98,25	100
	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	12.000.000	12000000	100,00	100
	Belanja Modal Personal Computer	13.000.000	13000000	100,00	100
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.500.000	3400000	97,14	100
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	188.308.000	188.252.600	99,97	100
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	170.000.000	169.944.600	99,97	100
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.308.000	4.308.000	100,00	100
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.000.000	14.000.000	100,00	100
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.017.000	7.017.000	100,00	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.017.000	7.017.000	100,00	100
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.600.000	6.720.000	78,14	78,14
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.600.000	6.720.000	78,14	78,14
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287.413.000	162.183.751	56,43	100
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	287.413.000	162.183.751	56,43	100
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.680.000	36.255.000	98,84	100
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	100
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	36.000.000	35.575.000	98,82	100
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.850.000	3.850.000	100,00	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.850.000	3.850.000	100,00	100
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.217.000	68.050.779	91,69	100
	Belanja Tagihan Air	2.317.000	2.317.000	100,00	100
	Belanja Tagihan Listrik	55.400.000	51.476.657	92,92	100
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.500.000	14.257.122	86,41	100
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.579.500	48.573.900	99,99	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.120.300	5.114.700	99,89	100
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	43.200.000	43.200.000	100,00	100

	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	115.200	115.200	100,00	100
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	144.000	144.000	100,00	100
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	283.230.000	236.731.225	83,58	83,63
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	34.000.000	33.856.225	99,58	100
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	129.230.000	124.635.000	96,44	96,44
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	120.000.000	78.240.000	65,20	65,2
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	5.900.000	73,75	73,75
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.000.000	3.150.000	78,75	78,75
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	4.000.000	2.750.000	68,75	68,75
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.180.000	65.381.000	98,79	99,24
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.180.000	680000	57,63	57,63
	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	65.000.000	64701000	99,54	100
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
19	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	60.129.600	52.905.600	87,99	98,67
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.293.750	2.293.750	100,00	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.116.250	1116250	100,00	100
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	21.600.000	21.600.000	100,00	100
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	800.000	0	0,00	0
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	57.600	57.600	100,00	100
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	72.000	72.000	100,00	100
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.190.000	27.766.000	81,21	100
20	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	60.129.600	57.257.100	95,22	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.027.500	3.027.500	100,00	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.012.500	3012500	100,00	100
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.480.000	2480000	100,00	100
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.800.000	8000000	90,91	100
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000	24.000.000	100,00	100
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	500.000	500000	100,00	100
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	750.000	750000	100,00	100
	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	4.000.000	4000000	100,00	100
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	57.600	57.600	100,00	100
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	72.000	72.000	100,00	100

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.430.000	11.357.500	84,57	100
21	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	273.800.000	256.099.000	93,54	99,76
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.000.000	16.400.000	96,47	96,47
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000	1.360.000	100,00	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	747.000	747000	100,00	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.799.000	1799000	100,00	100
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0	0	0,00	0
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	10.800.000	10.800.000	100,00	100
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	50.000	0	0,00	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	3.000.000	3000000	100,00	100
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.044.000	33.824.000	70,40	100
	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	191.000.000	188.169.000	98,52	100
22	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	100.064.800	87.139.431	87,08	99,36103
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.708.750	3.069.250	82,76	82,76
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.162.250	2.162.250	100,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	13.200.000	13.200.000	100,00	100,00
	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	28.800	28.800	100,00	100,00
	Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	36.000	36.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80.929.000	68.643.131	84,82	100
23	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	170.064.800	151.019.992	88,80	98,89
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	6.000.000	100,00	100
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.560.000	680000	26,56	26,56
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.976.000	5.976.000	100,00	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.268.000	2.268.000	100,00	100
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	13.200.000	13.200.000	100,00	100
	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	28.800	28800	100,00	100
	Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	36.000	36.000	100,00	100
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	50.000.000	49918000	99,84	100
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	89.996.000	72.913.192	81,02	100
24	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	24.920.000	99,68	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.800.000	2.800.000	100,00	100
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000	4.800.000	100,00	100
	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	10.000.000	9.920.000	99,20	100

	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	5.400.000	100,00	100
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.000.000	2.000.000	100,00	100
25	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2.209.675.600	2.156.381.900	97,59	98,45376
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	30.000.000	30.000.000	100,00	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.949.000	9.949.000	100,00	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.585.000	7.585.000	100,00	100
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	317.520.000	301.868.000	95,07	95,07
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.750.000	18.750.000	100,00	100
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.730.200.000	1.711.700.000	98,93	98,93
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	26.400.000	26.400.000	100,00	100
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.500.000	1.500.000	100,00	100
	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.353.600	1.351.200	99,82	100
	Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.692.000	1.689.000	99,82	100
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.726.000	45.589.700	70,43	100
26	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	195.000.000	186.235.000	95,51	99,3846
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.000.000	16.400.000	96,47	96,47
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.280.000	680.000	53,13	53,13
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.933.500	1.933.500	100,00	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	106.500	106500	100,00	100
	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	150.000.000	149.435.000	99,62	100
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	6.000.000	6.000.000	100,00	100
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	140.000	140000	100,00	100
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.540.000	11.540.000	62,24	100
	JUMLAH	8.337.090.839	7.716.093.204	92,55	98,84

B. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Secara keseluruhan realisasi fisik dan keuangan telah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi fisik pada Tahun 2022 mencapai 98,84% sedangkan realisasi keuangan mencapai 92,55%. Target yang tidak tercapai berasal dari sisa kegiatan

perjalanan dinas yaitu sisa biaya penginapan dan sisa belanja pegawai yaitu pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah untuk mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

A. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa Laporan Keuangan.

Dalam hal ini, yang bertindak sebagai entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan entitas akuntansinya adalah seluruh SPKD yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah Basis Kas (*Cash Basis*) untuk pengakuan Pendapatan dan Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual (*Accrual Basis*) untuk pengakuan Pendapatan-LO dan Beban pada Laporan Operasional serta Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca.

1. **Basis Kas (*Cash Basis*)** untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa Pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan.

2. **Basis Akrual** (*Accrual Basis*) untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Basis Akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

C. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai perolehan historis, yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk memenuhi kewajibannya.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

D. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kebijakan akuntansi untuk komponen-komponen yang terdapat dalam Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

I. PENJELASAN KOMPONEN UTAMA LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN - LRA

Pengakuan :

- Pengakuan pendapatan-LRA adalah pada saat telah diterima oleh bendahara penerimaan.
- Pendapatan yang telah diakui berarti pendapatan tersebut telah dicatat dalam catatan akuntansi untuk dilaporkan di dalam laporan realisasi anggaran.
- Pendapatan yang diterima bendahara penerimaan secara umum harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- Pencatatan dari setiap jenis pendapatan-LRA dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
- Koreksi dan pengembalian pendapatan yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- Koreksi dan pengembalian pendapatan yang tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan hanya oleh PPKD.
- Pendapatan berupa barang atau jasa tidak diakui di dalam LRA, melainkan diakui di dalam Laporan Operasional.

Pengukuran :

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

- Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.
- Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Sentral.

2. BELANJA - LRA

Pengakuan :

- Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Pengeluaran belanja yang dibayar dengan mekanisme LS diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke Bank untuk dicairkan.
- Selama periode berjalan, belanja LS dapat diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan. Untuk belanja LS yang dibayar mendekati akhir tahun anggaran diakui pada saat SP2D-LS diserahkan ke Bank.
- Khusus pengeluaran belanja melalui bendahara pengeluaran, dengan menggunakan UP/GU/TU, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Lain-lain PAD yang sah.
- Belanja modal dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya.
- Suatu rencana pengadaan aset tetap akan dianggarkan pada anggaran belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, tidak untuk dijual kembali atau diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat.
 - c. Nilainya lebih besar dari batasan minimal kapitalisasi aset.
- Suatu rencana pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap akan dianggarkan pada anggaran belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Nilainya lebih besar dari batasan minimal kapitalisasi aset.
- Pengeluaran belanja pemeliharaan aset yang tidak memenuhi kriteria akan dianggarkan di dalam belanja pemeliharaan (belanja barang dan jasa).

Pengukuran :

- Belanja dicatat sebesar nilai nominal brutonya berdasarkan dokumen pengeluaran yang sah.
- Nilai nominal diatas yaitu jumlah sebelum dikurangi potongan PFK sesuai dengan dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU.

II. PENJELASAN KOMPONEN UTAMA LAPORAN OPERASIONAL

1. PENDAPATAN - LO

Pengakuan :

- Pengakuan pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan.
 - b. Pendapatan direalisasi, baik secara tunai maupun masih berupa piutang.
- Pendapatan pajak daerah-LO yang tidak didahului dengan surat penetapan akan diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Indragiri Hili.
- Pendapatan pajak daerah-LO yang didahului dengan surat penetapan akan diakui pada saat penerbitan SKP Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Pendapatan pajak daerah-LO dengan sistem self-assessment diakui pada saat diterima pembayaran dari WP dan pada saat diterbitkan SKP kurang bayar. Jika terjadi lebih bayar, maka diterbitkan SKP lebih bayar untuk dijadikan dasar jurnal koreksi pengembalian pendapatan.
- Pendapatan retribusi-LO akan diakui pada saat pendapatan telah diterima pembayarannya di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterima bendahara penerimaan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Lain-lain PAD yang sah-LO diakui setelah penerbitan SK. Lain-lain PAD yang sah-LO yang tanpa penetapan SK, diakui saat kas diterima.

Pengukuran :

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi.
- Koreksi dan pengembalian pendapatan yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LO.
- Koreksi dan pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LO pada periode yang sama.
- Koreksi dan pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya hanya dibukukan oleh PPKD.

2. BEBAN - LO

Pengakuan :

- Pengakuan Beban-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban.
 - b. Terjadinya konsumsi aset.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban pegawai diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke Bank untuk dicairkan.
- Beban pegawai yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan dana UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU oleh PA/KPA.
- Beban barang dan jasa yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan dana UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU oleh PA/KPA.
- Beban barang dan jasa diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke Bank untuk dicairkan.
- Beban langganan daya dan jasa diakui ketika tagihan beban langganan daya dan jasa telah diterima Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

- Belanja persediaan yang diakui sebagai beban persediaan di dalam LO adalah nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun berjalan.
- Nilai persediaan yang telah dikonsumsi dihitung dengan menjumlahkan nilai persediaan awal tahun dengan belanja persediaan selama tahun berjalan dikurangi estimasi nilai persediaan pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Belanja yang dibayar dimuka diakui sebagai beban sewa untuk periode yang telah digunakan pemanfaatannya oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Beban penyusutan aset tetap dihitung semesteran, dengan asumsi jika aset diperoleh pada semester I (pertama) maka penyusutan dilakukan 1 (satu) tahun penuh. Jika aset diperoleh pada semester II (kedua) maka penyusutan dilakukan setengah tahun.
- Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus dengan memperhitungkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Nilai residu aset dianggap nol (nihil).
- Beban penyisihan piutang tak tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih agar nilai piutang dalam neraca merupakan nilai bersih.
- Beban bunga diakui berdasarkan jumlah waktu pinjaman yang terhitung dalam periode yang bersangkutan.
- Beban subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, beban tak terduga diakui pada tanggal SP2D-LS atau tanggal pencairan SP2D-LS ke Bank.

Pengukuran :

- Beban yang merupakan pengeluaran kas dicatat sebesar bruto berdasarkan dokumen yang sah.
- Beban non-kas dicatat sebesar nilai dari hasil perhitungan berdasarkan kebijakan akuntansi yang terkait.
- Koreksi atas beban dalam periode yang sama, dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan.
- Koreksi atas beban dari periode sebelumnya dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Koreksi yang tidak melibatkan kas tetapi hanya mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

3. SURPLUS/DEFISIT – LO DAN POS LUAR BIASA

Pengukuran :

- Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban-LO selama periode pelaporan.
- Selisih dari pendapatan-LO dan beban-LO yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- Surplus/defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
- Surplus/defisit-LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos kejadian luar biasa.
- Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.
- Pos luar biasa memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran.
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan dalam CaLK.

III. PENJELASAN KOMPONEN UTAMA NERACA

1. ASET LANCAR

Pengakuan :

- Aset diakui:
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah yang dapat berasal dari pemungutan pendapatan daerah, perikatan, transfer antar pemerintahan maupun tuntutan ganti kerugian daerah.

- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan stock opname.

Pengukuran :

- Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
- Piutang pajak/retribusi daerah dicatat sebesar jumlah pajak/retribusi daerah yang sampai akhir periode pelaporan belum dibayar oleh wajib pajak/retribusi daerah. Bila terdapat sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak/retribusi daerah oleh wajib pajak/retribusi daerah, jumlah sanksi administrasi tersebut dapat ditambahkan ke akun piutang pajak/retribusi daerah.
- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (Kelompok Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun kedepan sejak tanggal pelaporan Neraca.
- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dicatat sebesar jumlah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Kelompok Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun kedepan sejak tanggal pelaporan Neraca.
- Penyajian nilai piutang di neraca disajikan sebesar nilai yang dapat di realisasikan (net realizable value), yaitu nilai nominal piutang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada pada akhir periode pelaporan.
- Penyisihan piutang tak tertagih tidak dilakukan untuk piutang dana transfer dari pemerintah pusat dan piutang tuntutan ganti kerugian daerah.
- Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b. Harga Pokok Produksi, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2. ASET TETAP

Pengakuan :

- Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran :

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar saat perolehan.
- Batas minimal kapitalisasi aset tetap:
 - a. Perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi jika nilainya diatas Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit.
 - b. Perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi jika nilainya diatas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatas, dikecualikan untuk tanah, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga beli atau biaya konstruksi termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

- Untuk pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar saat diperoleh.
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO.
- Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya berupa aset renovasi dan alat musik modern.
- Penyusutan tidak dilakukan terhadap : Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan, Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan, dan Aset Tetap yang Rusak Berat/Usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penyusutan aset tetap dihitung terhadap harga perolehan secara semesteran. Hal ini berarti jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari s.d Juni, maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset tetap diperoleh antara bulan Juli s.d Desember, maka aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.
- Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa nilai residu.
- Aset tetap yang tidak memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
- Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

3. ASET LAINNYA

Pengakuan :

- Tagihan penjualan angsuran diakui saat telah terjadinya penjualan angsuran berdasarkan dokumen yang sah.
- Tagihan TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a. Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
 - b. Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

- c. Telah ada putusan lembaga peradilan yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah.
- Aset kemitraan diakui pada saat terjadinya perjanjian kerjasama kemitraan.
- Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria:
 - a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir/dinikmati oleh entitas.
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

Pengukuran :

- Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset dikurangi angsuran telah dibayarkan ke kas umum daerah.
- Tagihan TGR dicatat sebesar tagihan.
- Aset yang diserahkan dalam perjanjian kemitraan dicatat sebagai aset kerja sama sebesar nilai bersih atau nilai wajar sesuai dengan perjanjian.
- Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan atau nilai wajar.

4. KEWAJIBAN

Pengakuan :

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.

5. EKUITAS

Pengakuan/Pengukuran:

- Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- Ekuitas Akhir didalam Laporan Perubahan Ekuitas dihitung dengan menambah/mengurangi saldo ekuitas awal tahun dengan surplus/defisit LO tahun berjalan dan koreksi-koreksi yang secara langsung menambah/mengurangi ekuitas.

A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memuat anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selama semester pertama tahun anggaran 2022.

I. PENDAPATAN

Pendapatan meliputi semua penerimaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah provinsi.

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah untuk Entitas Akuntansi terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak memiliki wewenang memungut Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2022 bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak memiliki anggaran untuk Pendapatan, sehingga realisasi semua Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran bernilai **Rp.0,00 (nol rupiah)**.

II. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dalam periode tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Daerah. Belanja yang terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dari alokasi anggaran dalam DPA-SKPD sebesar **Rp.8.337.090.839,00,-** sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 telah direalisasikan sebesar **Rp.7.716.093.204,-** atau mencapai **92,55%**.

Adapun rincian nilai anggaran dan realisasi belanja selama tahun anggaran 2022 serta perbandingannya dengan Realisasi anggaran Tahun 2021 berikutnya adalah sebagai berikut :

Jenis Belanja	Tahun 2022			Realisasi tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Operasi	7.983.590.839,00	7.368.733.204,00	92,30%	7.133.216.933,00
Belanja Modal	353.500.000,00	347.360.000,00	98,26%	1.357.407.589,00
Jumlah	8.337.090.839,00	7.716.093.204,00	92,55%	8.490.624.522,00

2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Belanja Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dengan realisasi Tahun 2022 sebesar **Rp.7.368.733.204,00-** atau **92.30%** dari anggaran. Adapun rincian Anggaran dan Belanja Operasi selama tahun anggaran 2022 serta perbandingannya dengan Realisasi Tahun 2021 berikutnya adalah sebagai berikut :

Belanja Operasi	Tahun 2022			REALISASI TAHUN 2021
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Pegawai	3.898.360.839,00	3.638.381.426,00	93,33	3.386.750.059,00
Belanja Barang dan Jasa	4.085.230.000,00	3.730.351.778,00	91,31	3.746.466.874,00
Jumlah	7.983.590.839,00	7.368.733.204,00	92,30%	7.133.216.933,00

2.1.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp.3.638.381.426,00-** atau **93,33%** dari jumlah yang telah dianggarkan. Perbandingan anggaran dan realisasi belanja pegawai selama tahun 2022 serta perbandingannya dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 berikutnya adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2022			Realisasi tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Pegawai	3.898.360.839,00	3.638.381.426,00	93,33	259.979.413,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.538.356.515,00	2.402.227.426,00	93,33	136.129.089,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.867.218.339,00	1.763.418.960,00	93,33	2.672.539.008,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.867.218.339,00	1.763.418.960,00	94,44	1.700.069.560,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	192.486.914,00	189.887.236,00	94,44	224.597.740,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	192.486.914,00	189.887.236,00	98,65	187.973.573,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	149.110.000,00	145.190.000,00	98,65	140.460.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	149.110.000,00	145.190.000,00	97,37	148.770.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.400.000,00	-	97,37	52.947.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.400.000,00	-	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	64.232.250,00	56.550.000,00	88,04	95.790.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	64.232.250,00	56.550.000,00	88,04	53.045.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	124.235.813,00	115.509.900,00	92,98	143.343.460,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	124.235.813,00	115.509.900,00	92,98	116.306.520,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.620.444,00	7.469.232,00	77,64	76.946.567,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.620.444,00	7.469.232,00	77,64	6.641.413,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	39.359,00	19.109,00	48,55	63.191,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	39.359,00	19.109,00	48,55	22.731,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	109.725.448,00	109.725.448,00	100,00	163.269.267,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	109.725.448,00	109.725.448,00	100,00	104.712.272,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.340.566,00	3.614.357,00	83,27	7.386.744,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.340.566,00	3.614.357,00	83,27	3.469.702,00
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	12.947.382,00	10.843.184,00	83,75	16.160.075,00
Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12.947.382,00	10.843.184,00	83,75	10.409.288,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.360.004.324,00	1.236.154.000,00	83,75	4.607.005.943,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	562.334.324,00	514.544.000,00	91,50	1.796.824.535,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	562.334.324,00	514.544.000,00	91,50	422.300.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	204.870.000,00	169.650.000,00	82,81	128.157.598,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	204.870.000,00	169.650.000,00	82,81	143.550.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	491.780.000,00	456.300.000,00	82,81	2.682.023.810,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	491.780.000,00	456.300.000,00	92,79	398.000.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	101.020.000,00	95.660.000,00	92,79	2.682.023.810,00
belanja Honorarium	101.020.000,00	95.660.000,00	94,69	91.480.000,00

2.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp3.730.351.778,00,-** atau **91,31%** dari jumlah yang telah dianggarkan. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun anggaran 2022 serta perbandingannya dengan Realisasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			REALISASI TAHUN 2021
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Barang dan Jasa	4.085.230.000,00	3.730.351.778,00	91,31	3.746.466.874,00
Belanja Barang	920.042.000,00	892.387.400,00	96,99	904.073.250,00
Belanja Barang Pakai Habis	920.042.000,00	892.387.400,00	96,99	904.073.250,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	170.000.000,00	169.944.600,00	99,97	209.434.700,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.349.200,00	60.354.600,00	98,38	54.657.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.059.500,00	38.559.500,00	98,72	37.673.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	2.499.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.115.000,00	6.115.000,00	100,00	8.800.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.120.300,00	5.114.700,00	99,89	32.777.300,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	150.000.000,00	149.435.000,00	99,62	39.900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.028.000,00	13.028.000,00	100,00	43.850.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	331.520.000,00	315.868.000,00	95,28	376.210.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.000.000,00	33.600.000,00	84,00	19.998.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	90.000.000,00	86.598.000,00	96,22	58.410.000,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	10.000.000,00	9920000	99,20	0,00
Belanja Pakaian Olahraga	0	0	0,00	19864000
Belanja Jasa	2.137.995.000,00	2.109.567.604	98,67	2.382.015.839
Belanja Jasa Kantor	2.084.107.000,00	2.055.767.004,00	98,64	2.368.515.839,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.200.000,00	13400000	94,37	9.800.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18750000	18750000	100,00	33750000
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.736.200.000,00	1.717.700.000,00	98,93	2.012.650.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	134.400.000,00	134.400.000,00	100,00	140.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	43.700.000,00	43.700.000,00	100,00	43.700.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	10.800.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.440.000,00	4.390.000,00	98,87	2.510.000,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	4.000.000,00	4000000	100,00	6.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	800.000,00	0	0,00	7.000.000,00

Uraian	Tahun 2022			Prognosis
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Tagihan Air	2.317.000,00	2317000	100,00	1.900.000,00
Belanja Tagihan Listrik	55.400.000,00	51476657	92,92	42.328.149,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.600.000,00	6720000	78,14	6.720.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.500.000,00	14257122	86,41	15.302.040,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	34.000.000,00	33.856.225,00	99,58	35.655.650,00
Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.888.000,00	3.882.600,00	99,86	0,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.728.000,00	1.725.600,00	99,86	0,00
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.160.000,00	2.157.000,00	99,86	0,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.500.000
Belanja Sewa Alat Musik	0,00	0,00	0,00	13.500.000
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	49.918.000,00	99,84	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	50.000.000,00	49.918.000,00	99,84	0,00
Belanja Pemeliharaan	260.230.000,00	211.775.000,00	81,38	87.270.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	260.230.000,00	211.775.000,00	81,38	87.270.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	3.000.000,00	3.000.000	100,00	2.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	129.230.000,00	124.635.000,00	96,44	50.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	120.000.000,00	78.240.000,00	65,20	30.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.000.000,00	3.150.000,00	78,75	2.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0	0	0,00	3270000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	4.000.000,00	2.750.000,00	68,75	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	766.963.000,00	516.621.774,00	67,36	373.107.785,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	766.963.000,00	516.621.774,00	67,36	373.107.785,00

2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat atau meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Realisasi Belanja Modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp.347.360.000,00,-** dari anggaran. Adapun rincian Anggaran dan Belanja Modal pada semester pertama tahun 2022 serta perbandingannya dengan Realisasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Belanja Modal	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Tanah	-	-	0,00%	-
Belanja Modal				
Peralatan dan Mesin	288.500.000,00	282.659.000,00	97,98%	132.420.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	64.701.000,00	99,54%	14.990.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	0,00%	1.209.697.589,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00%	300.000,00
Belanja Aset Lainnya	-	-	0,00%	
Jumlah	353.500.000,00	347.360.000,00	98,26%	1.357.407.589,00

2.2.1 BELANJA MODAL – TANAH

Pos Belanja Modal - Tanah ini merupakan jumlah seluruh belanja modal yang diperuntukkan dalam perolehan Aset Tetap Tanah. Selama tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak menganggarkan belanja modal ini. Sehingga didalam LRA, anggaran dan realisasi akun ini bernilai **Rp. 0,00 (nol rupiah)**.

2.2.2 BELANJA MODAL – PERALATAN DAN MESIN

Pos Belanja Peralatan dan Mesin ini merupakan jumlah seluruh belanja modal untuk perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama semester pertama tahun 2022 yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja ini menambah nilai aset tetap dan telah disajikan didalam Neraca per 31 Desember 2022.

Dana yang dianggarkan untuk Belanja Peralatan dan Mesin selama tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 288.500.000,00,-** dan sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar **Rp. 282.659.000,00**. Untuk lebih jelasnya, ikhtisar realisasi Belanja Peralatan dan Mesin selama tahun anggaran 2022 serta perbandingannya dengan Realisasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Modal	353.500.000,00	347.360.000,00	98,26	2.567.105.178,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	288.500.000,00	282.659.000,00	97,98	132.420.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	191.000.000,00	188.169.000,00	98,52	47.500.000,00
Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	191.000.000,00	188.169.000,00	98,52	47.500.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	36.000.000,00	35.575.000,00	-	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	36.000.000,00	35.575.000,00	98,82	0
Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	31.000.000,00	28.550.000,00	92,10	74.720.000,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0	0,00	39.720.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	21.000.000,00	19.600.000,00	93,33	-
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	8.950.000,00	89,50	35.000.000,00
Belanja Modal Alat Studio	2.000.000,00	1.965.000,00	98,25	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.000.000,00	1.965.000,00	98,25	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Komputer Unit	16.500.000,00	16.400.000,00	99,39	6.000.000,00
Belanja Modal Personal Computer	13.000.000,00	13000000	100,00	0,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.500.000,00	3400000	97,14	6.000.000,00

2.2.3 BELANJA MODAL – GEDUNG DAN BANGUNAN

Pos Belanja Modal –Gedung dan Bangunan ini merupakan pos untuk jumlah seluruh belanja modal yang diperuntukkan dalam perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Selama Tahun 2022 terdapat realisasi sebesar **Rp. 64.701.000,-**. Untuk lebih jelasnya, ikhtisar realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama tahun anggaran 2022 serta perbandingannya dengan Realisasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	64.701.000,00	99,54	1.224.687.589,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	65.000.000,00	64.701.000,00	99,54	1.224.687.589,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	65.000.000,00	64.701.000	99,54	14.990.000,00

2.2.4 BELANJA MODAL – JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Merupakan pos untuk jumlah seluruh belanja modal yang diperuntukkan untuk perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan. Selama Tahun 2022 tidak terdapat realisasi pada belanja ini. Sehingga realisasi akun ini didalam LRA bernilai **Rp. 0,00 (nol rupiah)**.

2.2.5 BELANJA MODAL – ASET TETAP LAINNYA

Pos Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya ini merupakan jumlah seluruh belanja modal untuk perolehan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok Belanja Modal Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Dana yang dianggarkan untuk Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya selama tahun 2022 adalah sebesar **Rp.0,00 (nol rupiah)**. dan sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar **Rp. 0,00 (nol rupiah)**.

2.2.6 BELANJA MODAL – ASET LAINNYA

Merupakan jumlah seluruh belanja modal untuk perolehan Aset Lainnya, contoh : Aset Tak Berwujud. Pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak menganggarkan belanja modal untuk pos ini. Sehingga didalam LRA, anggaran dan realisasi akun ini bernilai **Rp. 0,00 (nol rupiah)**.

B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

I. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah untuk Entitas Akuntansi terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak memiliki wewenang memungut Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2022 bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak memiliki anggaran untuk Pendapatan, sehingga realisasi semua Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Operasional bernilai **Rp. 0,- (nol rupiah)**.

Badan Penanggulangan bencana Daerah Pada Tahun 2022 Memiliki Pendapat Hibah Sebesar **Rp332.828.571,43**. Pendapatan Ini Berasal Dari Mutasi Barang Berupa perlengkapan kebakaran sebesar **Rp.776.600.000,-** dikurangi dengan akumulasi penyusutan **Rp.443.771.428,57-**. Realisasi Pendapatan LO Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 serta perbandingannya dengan realisasi Pendaapatan LO pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Beban	31-Dec-22	31-Des-21	Kenaikan/ Penurunan	%
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	332.828.571,43	345.500.000,00	-12.671.428,57	-381%
Jumlah	332.828.571,43	345.500.000,00	-12.671.428,57	-380,72%

II. BEBAN - LO

Beban LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Realisasi beban LO Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per Desember 2022 serta perbandingannya dengan realisasi Beban LO pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Beban	31-Dec-22	31-Des-21	Kenaikan/ Penurunan	%
- Beban Pegawai	3.638.381.426,00	3.385.570.059,00	252.811.367,00	6,95
- Beban Barang	892.298.900,00	947.690.250,00	-55.391.350,00	-6,21
- Beban Jasa	2.106.286.826,00	2.382.609.212,00	-276.322.386,00	-13,12
- Beban Pemeliharaan	211.775.000,00	87.270.000,00	124.505.000,00	58,79
- Beban Perjalanan Dinas	516.621.774,00	373.107.785,00	143.513.989,00	27,78
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.806.736.890,82	2.915.963.862,30	-109.226.971,48	-3,89
- Beban lain-lain	12.139.000,00	15.300.000,00	-3.161.000,00	-26,04
Jumlah	10.184.239.816,82	10.107.511.168,30	76.728.648,52	0,76

2.1 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp.3.638.381.426,00,-**. Adapun rincian Beban Pegawai pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan Beban Pegawai pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	U r a i a n	31-Dec-22	31-Des-21
	Beban Pegawai	3.638.426.352,00	3.385.570.059,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.763.418.960,00	1.700.069.560,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	189.887.236,00	187.973.573,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	145.190.000,00	148.770.000,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	56.550.000,00	53.045.000,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	115.509.900,00	116.306.520,00

Kode Rekening	Uraian	31-Dec-22	31-Dec-21
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.469.232,00	6.641.413,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	19.109,00	22.731,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	109.725.448,00	104.712.272,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.614.357,00	3.469.702,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	10.843.184,00	10.409.288,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	514.544.000,00	422.300.000,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	169.650.000,00	143.550.000,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	456.300.000,00	398.000.000,00
8.1.01.03.07.	Beban Honorarium	95.660.000,00	90.300.000,00

2.2 BEBAN PERSEDIAAN

Belanja persediaan yang diakui sebagai beban persediaan di dalam Laporan Operasional (LO) adalah nilai persediaan yang telah di konsumsi selama tahun berjalan. Nilai persediaan yang telah dikonsumsi dihitung dengan menjumlahkan nilai persediaan awal tahun dengan belanja/perolehan persediaan selama tahun berjalan, kemudian dikurangi dengan estimasi nilai persediaan yang tersisa pada akhir periode akuntansi bersangkutan.

Beban Persediaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp.0,00,- (Nol Rupiah)** sedangkan Beban Persediaan pada 31 Desember tahun 2021 adalah sebesar **Rp.0,00,- (Nol Rupiah),-**.

2.3 BEBAN BARANG

Realisasi Beban Barang – LO pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 892.298.900,00,-** sedangkan realisasi Beban Barang pada 31 Desember tahun 2021 adalah sebesar **Rp.947.690.250,00,-**. Adapun rincian Beban Barang pada semester pertama tahun 2022 serta perbandingannya dengan realisasi Beban Barang pada 31 Desember tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	31-Dec-22	31-Des-21
	Beban Barang	892.298.900,00	947.690.250,00
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	892.298.900,00	947.690.250,00

2.4 BEBAN JASA

Realisasi Beban Jasa – LO pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 2.106.286.826,-** sedangkan realisasi Beban Jasa pada 31 Desember tahun 2021 adalah sebesar **Rp.2.382.609.212,00,-**. Adapun rincian Beban Jasa pada semester pertama tahun 2022 serta perbandingannya dengan realisasi Beban Jasa pada 31 Desember tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	31-Dec-22	31-Des-21
	Beban Jasa	2.106.286.826,00	2.382.609.212,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	2.052.486.226,00	2.369.109.212,00
8.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.882.600,00	-
8.1.02.02.07.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	13.500.000,00
8.1.02.02.08.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	49.918.000,00	-

2.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan termasuk dalam kategori belanja langsung (belanja kegiatan). Beban pemeliharaan merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk merawat atau memperbaiki aset tetap agar dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Beban Pemeliharaan pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 211.775.000,00,-** sedangkan Beban Pemeliharaan pada 31 Desember tahun 2021 sebesar **Rp.87.270.000,00,-**. Rincian Beban Pemeliharaan tahun 2022 dan perbandingannya dengan Beban Pemeliharaan 31 Desember tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	31-Dec-22	31-Des-21
	Beban Pemeliharaan	211.775.000,00	87.270.000,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	211.775.000,00	87.270.000,00

2.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Selama tahun 2022 terdapat Beban Perjalanan Dinas – LO sebesar **Rp. 516.621.774,-**. Adapun rincian Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	31-Dec-22	31-Dec-21
	Beban Pemeliharaan	516.621.774,00	373.107.785,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	516.621.774,00	373.107.785,00

2.7 BEBAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA

Selama tahun 2022 dan 2021 tidak terdapat Beban Barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, sehingga nilai akun ini per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.0,00,- (Nol Rupiah)**.

2.8 BEBAN HIBAH

Selama semester pertama tahun 2022 terdapat Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar **Rp. 0,00,- (Nol Rupiah)**.

2.9 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp2.806.736.890,82,-**. Sedangkan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2021 adalah sebesar **Rp.2.915.963.862,30,-**. Adapun perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2022 dan 31 Desember tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian	31-Dec-22	31-Dec-21
Beban Penyusutan	2.806.736.890,82	2.915.963.862,30
Jumlah	2.806.736.890,82	2.915.963.862,30

- **Beban Penyusutan Aset Tetap – LO**

Beban Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat di susutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Penyusutan Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 2.806.736.890,82,-**. Adapun rincian Beban Penyusutan Aset Tetap pada tahun 2022 dan perbandingannya dengan Beban Penyusutan Aset Tetap pada 31 Desember tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Beban Penyusutan	2.806.736.890,82	2.915.963.862,30
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.772.037.505,46	2.771.761.637,60
8.2.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	1.922.355.262,71	1.914.396.119,86
8.2.01.01.03.	Beban Penyusutan Alat Bantu	1.922.355.262,71	1.914.396.119,86
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	536.223.503,15	548.924.003,14
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	104.196.253,15	158.021.753,14
8.2.01.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	82.250.000,00	41.125.000,00
8.2.01.02.03.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor	349.777.250,00	349.777.250,00
8.2.01.03.	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.124.600,00	6.124.600,00
8.2.01.03.01.	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	6.124.600,00	6.124.600,00
8.2.01.04.	Beban Penyusutan Alat Pertanian	1.050.000,00	525.000,00
8.2.01.04.01.	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	1.050.000,00	525.000,00
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	287.863.464,60	275.341.464,60
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor	1.483.091,00	1.483.091,00
8.2.01.05.02.	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	283.380.373,60	272.358.373,60
8.2.01.05.03.	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.000.000,00	1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	31 desember 2022	31 desember 2021
8.2.01.06.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.893.800,00	18.747.200,00
8.2.01.06.02.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	7.893.800,00	18.747.200,00
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	10.526.875,00	7.703.250,00
8.2.01.10.01.	Beban Penyusutan Komputer Unit	6.507.500,00	4.113.750,00
8.2.01.10.02.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	4.019.375,00	3.589.500,00
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.827.490,36	47.237.091,70
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	16.702.643,80	44.112.245,14
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.702.643,80	44.112.245,14
8.2.02.04.	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.124.846,56	3.124.846,56
8.2.02.04.01.	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	3.124.846,56	3.124.846,56
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	14.871.895,00	96.965.133,00
8.2.03.01.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	13.098.770,00	88.183.408,00
8.2.03.01.01.	Beban Penyusutan Jalan	6.164.200,00	81.248.838,00
8.2.03.01.02.	Beban Penyusutan Jembatan	6.934.570,00	6.934.570,00
8.2.03.02.	Beban Penyusutan Bangunan Air	1.773.125,00	8.781.725,00
8.2.03.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	1.773.125,00	1.773.125,00
8.2.03.02.04.	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman	0	7.008.600,00

2.10 BEBAN LAIN-LAIN

Beban Lain-lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 12.139.000,-**.

Kode Rekening	Uraian	31 desember 2022	31 desember 2021
	Beban Pemeliharaan	12.139.000	15.300.000
8.6.01.01.01.	Beban lain-lain	12.139.000	15.300.000,00

III. SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/defisit kegiatan non-operasional adalah selisih dari pendapatan LO dan beban yang sifatnya tidak rutin. Selama Tahun 2022 tidak terdapat transaksi dari kegiatan non operasional, sehingga Surplus/defisit kegiatan non-operasional Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.0,00 (nol rupiah)**.

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-	0,00%
Jumlah	-	-	-	0,00%

IV. POS LUAR BIASA

Pos luar biasa merupakan pos yang memuat transaksi kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik yaitu kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran dan tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Selama Tahun 2022 tidak terdapat transaksi kejadian luar biasa, sehingga Pos Luar Biasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.0,00 (nol rupiah)**.

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
- Pos Luar Biasa	-	-	-	0,00%
Jumlah	-	-	-	0,00%

V. SURPLUS/DEFISIT - LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa, Surplus/Defisit- LO pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 adalah sebesar **(Rp. 9.851.411.245,39)**. Adapun perbandingan antara Surplus/Defisit – LO pada 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
- surplus/defisit LO	(9.851.411.245,39)	(9.762.011.168,30)	(89.400.077,09)	0,91
Jumlah	(9.851.411.245,39)	(9.762.011.168,30)	(89.400.077,09)	0,91

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Terdapat dampak perubahan kebijakan/kesalahan mendasar karena perubahan basis akuntansi dengan rincian sebagai berikut:

I. EKUITAS AWAL

Ekuitas awal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 1 Januari 2022 adalah sebesar **Rp. 10.900.202.007,-**.

II. SURPLUS/DEFISIT - LO

Surplus/Defisit LO Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 adalah sebesar **(Rp. 9.851.411.245,39)**.

III. RK - PPKD

RK – PPKD merupakan rekening timbal balik (*reciprocal account*) antara SKPD dan SKPKD yang akan dieliminasi pada setiap akhir periode pelaporan dan tidak muncul sebagai saldo awal pada periode pelaporan berikutnya. Jenis akun ini merupakan akun real, dimana RK-PPKD merupakan ekuitas bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. RK – PPKD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 2.772.947.744,15-**.

IV. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak perubahan kebijakan / Kesalahan mendasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.(0,00)**.

V. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp 3.821.738.505,78,-**.

D. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca memuat Aset, Kewajiban dan Ekuitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

I. ASET

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Jumlah Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.27.164.865.521,67-** atau Turun sebesar **12,80%** dari jumlah Aset tahun sebelumnya.

Tabel : Nilai Aset pada Neraca

Aset	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Des-21	Rp	%
Aset Lancar	7.119.695,00	7.031.195,00	88.500,00	1,26
Aset Tetap	27.139.526.776,67	31.127.092.430,68	-3.987.565.654,01	-12,81
Aset Lainnya	18.219.050,00	18.219.050,00	0,00	0,00
	27.164.865.521,67	31.152.342.675,68	-3.987.477.154,01	-12,80

1. ASET LANCAR

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan. Jumlah aset lancar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 7.119.695,00,-**. Rincian masing-masing aset lancar tersebut per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel : Nilai Aset Lancar pada Neraca

Aset Lancar	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Des-21	Rp	%
- Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0	0,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0	0,00	0,00
- Piutang Pendapatan	0	0	0	0,00

- Piutang Lain-Lain	0	0	0	0,00
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0,00
- Beban Dibayar Dimuka	0	0	0	0,00
- Persediaan	7.119.695,00	7.031.195,00	-170.000,00	- 2,42
Total	7.119.695,00	7.031.195,00	-170.000,00	- 2,42

1.1 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp 0,- (nol rupiah)**. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak memiliki Bendahara Penerimaan. Hal ini disebabkan karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak memiliki wewenang untuk memungut Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak terdapat transaksi yang berkaitan dengan akun Kas di Bendahara Penerimaan.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Dec-21	Rp	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.2 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening giro bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana Uang Persediaan (UP) atau sisa Tambah Uang (TU) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per tanggal neraca adalah sebesar **Rp. 0,00,- (Nol Rupiah)**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Dec-21	Rp	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0	0,00	0,00%

1.3 PIUTANG PENDAPATAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilirbukun merupakan SKPD yang diberikan wewenang untuk memungut pajak atau retribusi daerah, sehingga saldo Piutang Pendapatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp 0,- (nol rupiah)**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Dec-21	Rp	%
Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.4 PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang tidak dapat dicatat tersendiri dalam akun piutang diatas. Saldo Piutang Lain-Lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp 0,- (nol rupiah)**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Dec-21	Rp	%
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.5 PENYISIHAN PIUTANG

Penyisihan Piutang digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kemungkinan tidak tertagihnya

piutang. Saldo akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp 0,- (nol rupiah)**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Dec-21	Rp	%
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.6 BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban Dibayar di Muka merupakan pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dibayarkan dari rekening bendahara pengeluaran dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Saldo akun Beban Dibayar Dimuka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp 0,- (nol rupiah)**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Dec-21	Rp	%
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.7 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 7.119.695,00,-**. Jumlah tersebut merupakan hasil perhitungan secara fisik (*stock opname*) yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2022. Penilaian dilakukan dengan berdasarkan harga pembelian terakhir barang tersebut. Adapun rincian masing-masing saldo Persediaan Per 31

Desember 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Des-21	Rp	%
Persediaan	7.119.695,00	7.031.195,00	88.500,00	1,26

2. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2022 diperoleh dari Saldo Aset Tetap tahun lalu yaitu per tanggal 31 Desember 2021 ditambah dengan Nilai Perolehan Aset Tetap selama tahun anggaran 2022.

Tabel : Nilai Aset Tetap pada Neraca

Aset Tetap	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Des-21	Rp	
- Tanah	666.000.000,00	666.000.000,00		0,00
- Peralatan dan Mesin	24.671.106.226,67	23.574.943.026,67	1.096.163.200,00	
- Gedung dan Bangunan	1.063.352.800,00	2.392.849.754,01	-1.329.496.954,01	
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	567.112.750	4.321.344.650,00	-3.754.231.900,00	
- Aset Tetap Lainnya	171.955.000,00	171.955.000,00		0,00
- Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0		0,00
- Akumulasi Penyusutan	-23.337.578.200,89	-20.246.711.075,66	-3.090.867.125,23	
Total	3.801.948.575,78	10.880.381.355,02	-7.078.432.779,24	

Penurunan nilai Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selama Tahun 2022 adalah sebesar **Rp.7.078.432.779,24,-**. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan nilai Akumulasi Penyusutan selama tahun 2022 sebesar **Rp.3.090.867.125,23,-** dan Penambahan nilai aset peralatan dan mesin

sebesar **Rp.1.096.163.200,00**, serta Penurunan aset Bangunan gedung Sebesar **Rp.1.329.496.954,01-** dan Penurunan Aset Jalan, Irigasi dan jaringan Sebesar **Rp.3.754.231.900,00-** yang mana keduanya dimutasi ke Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir.

2.1 TANAH

Tanah yang ditempati oleh Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan bagian dari kawasan tanah kompleks Perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak di Jl. Swarna Bumi Kota Tembilihan. Tanah ini milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan tercatat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga nilai Tanah pada Neraca Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp 666.000.000,00**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Dec-21	Rp	%
Tanah	666.000.000,00	666.000.000,00	0,00	0,00

2.2 PERALATAN DAN MESIN

Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Alat-alat Berat, Alat Angkutan, Alat Bengkel, Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi, Alat Ukur, Alat Kesehatan dan Alat Keamanan. Nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 24.671.106.226,67**. Nilai tersebut tidak sama dengan nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 karena terdapat realisasi belanja modal peralatan dan mesin selama tahun 2022 **Rp. 285.379.000,00-** dikurangi dengan aset dibawah kapitalisasi (Extracountable) sebesar **Rp12.139.000,00**. Dan terdapat penambahan Hibah Barang Dari BNPB sebesar **Rp. 822.923.200,00-**. Rincian Peralatan dan Mesin serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel : Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	Saldo Per		Tambah (Kurang)
	31-Des-22	31-Des-21	Rp
Alat Besar	14.531.568.905,67	13.684.644.905,67	846.924.000,00
Alat Angkutan	6.120.806.235,00	6.084.551.235,00	36.255.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	61.246.000,00	61.246.000,00	0,00
Alat Pertanian	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.055.957.669,00	2.907.873.669,00	148.084.000,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	200.222.450,00	198.234.450,00	1.988.000,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.705.000,00	23.705.000,00	0,00
Komputer	368.532.767,00	351.943.767,00	16.589.000,00
Alat Keselamatan Kerja	304.867.200,00	258.544.000,00	46.323.200,00
	24.671.106.226,67	23.574.943.026,67	1.096.163.200,00

1.1.1 Alat-Alat Berat

Nilai Alat-alat Berat yang disajikan adalah sebesar biaya perolehannya yakni sebesar jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai. Nilai aset ini per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.14.531.568.905,67,-** memiliki Penambahan nilai dari Nilai per 31 Desember 2021, karena terdapat realisasi Belanja Modal berupa Mesin Pompa Air sebesar **Rp.70.324.000,00-** setelah ditambah harga perolehan dan Mutasi Hibah dari BNPB sebesar **Rp.776.600.000,00-** pada tahun 2022.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Des-21	Rp	%
Alat-alat Berat	14.531.568.905,67	13.684.644.905,67	846.924.000,00	0,00

1.1.2 Alat-Alat Angkutan

Nilai Alat-Alat Angkutan yang disajikan adalah sebesar biaya perolehannya yakni sebesar jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai. Selama Tahun anggaran 2022 terdapat mutasi atas nilai atas aset Alat-Alat Angkutan yang berasal dari Realisasi belanja Modal ditambah dengan Harga Perolehan sebesar **Rp.36.255.000,00-**. Sehingga nilai aset ini per 31 Desember 2022 tetap sebesar **Rp. 6.120.806.235,00-**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Des-21	Rp	%
Alat-Alat Angkutan	6.120.806.235,00	6.084.551.235,00	36.255.000,00	0,01

1.1.3 Alat Bengkel dan Alat Ukur

Disajikan sebesar biaya perolehannya yakni sebesar harga beli ditambah segala biaya yang dikeluarkan yang telah dikapitalisasi dalam rangka memperoleh kepemilikan atas Alat Bengkel tersebut. Selama Tahun anggaran 2022 tidak terdapat mutasi Alat Bengkel, sehingga nilai aset ini di neraca per 31 Desember 2022 adalah tetap sebesar **Rp.61.246.000,00,-**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Des-21	Rp	%
Alat Bengkel	61.246.000,00	61.246.000,00	0,00	0,00

1.1.4 Alat Pertanian

Disajikan sebesar biaya perolehannya yakni sebesar harga beli ditambah segala biaya yang dikeluarkan yang telah dikapitalisasi dalam rangka memperoleh kepemilikan atas Alat Pertanian tersebut. Selama Tahun anggaran 2022 tidak terdapat mutasi Alat Pertanian sehingga nilai aset ini di neraca per 31 Desember 2022 adalah tetap sebesar **Rp.4.200.000,00,-**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Des-21	Rp	%
Alat Pertanian	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00

1.1.5 Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

Nilai aset ini disajikan sebesar biaya perolehannya yakni sebesar jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap untuk digunakan. Jumlah pengeluaran tersebut terdiri dari harga beli sebesar belanja modal ditambah dengan biaya-biaya lainnya

yang berhubungan langsung dengan perolehan aset. Selama Tahun anggaran 2022 terdapat mutasi atas nilai Alat-alat kantor dan rumah tangga yang berasal dari Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 ditambah Harga Perolehan sehingga menjadi sebesar **Rp.148.084.000,00**. Nilai aset ini di neraca per 31 Desember 2022 adalah tetap sebesar **Rp. 3.055.957.669,-**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Des-22	31-Des-21	Rp	%
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	3.055.957.669,00	2.907.873.669,00	148.084.000,00	0,05

1.1.6 Alat Studio , Komunikasi, dan Pemancar

Nilai aset ini disajikan sebesar harga perolehannya yakni sebesar harga beli ditambah segala biaya yang dikeluarkan yang telah dikapitalisasi dalam rangka memperoleh kepemilikan atas alat studio ,alat komunikasi dan Pemancar tersebut sampai siap untuk dipakai. Selama Tahun anggaran 2022 terdapat mutasi atas nilai alat studio ,alat komunikasi dan Pemancar yang berasal dari realisasi belanja modal ditambah harga perolehan berupa alat speaker sebesar **Rp.1.988.000,00**. Sehingga nilai aset ini per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.200.222.450,00-** sama dengan Nilai aset per 31 Desember 2022.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Des-21	Rp	%
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	200.222.450,00	198.234.450,00	1.988.000,00	1,00

1.1.7 Alat Kedokteran dan Kesehatan

Nilai Alat Kedokteran dan Kesehatan disajikan sebesar harga perolehannya yakni sebesar harga beli ditambah segala biaya yang dikeluarkan yang telah dikapitalisasi dalam rangka memperoleh kepemilikan atas alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut. Selama Tahun anggaran 2022 tidak

terdapat pembelian Alat Kedokteran dan Kesehatan. Sehingga per 30 Juni 2022 nilai aset ini tetap sebesar **Rp.351.943.767,00,-**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Dec-21	Rp	%
Alat Kesehatan	351.943.767,00	351.943.767,00	0,00	0,00

1.1.8 Komputer

Nilai Komputer disajikan sebesar harga perolehannya yakni sebesar harga beli ditambah segala biaya yang dikeluarkan yang telah dikapitalisasi dalam rangka memperoleh kepemilikan atas Komputer tersebut. Selama Tahun anggaran 2022 terdapat mutasi atas Komputer yang berasal dari realisasi Belanja modal sebesar **Rp.16.589.000,00,-**. Sehingga per 31 Desember 2022 nilai aset ini tetap sebesar **Rp. 368.532.767,00,-**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Dec-21	Rp	%
Komputer	368.532.767,00	351.943.767,00	16.589.000,00	4,71

1.1.9 Alat Keselamatan Kerja

Nilai Alat Keselamatan Kerja disajikan sebesar harga perolehannya yakni sebesar harga beli ditambah segala biaya yang dikeluarkan yang telah dikapitalisasi dalam rangka memperoleh kepemilikan atas alat Kemanan tersebut. Selama Tahun anggaran 2022 terdapat mutasi atas Aset Alat Keamanan yang berasal dari Mutasi Hibah dari BNPB berupa Alat Masker sebesar **Rp. 46.323.200,00,-**. Sehingga per 31 Desember 2022 nilai aset ini tetap sebesar **Rp.304.867.200,00,-**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Dec-21	Rp	%
Alat Keselamatan Kerja	304.867.200,00	258.544.000,00	46.323.200,00	17,92

2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berada di Jl. Swarna Bumi No. 3 Tembilihan dengan rincian Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar **Rp.839.735.000,00,-** dan Pagar Kantor sebesar **Rp.158.236.800,00,-**. Pada Tahun 2022 terdapat Realisasi belanja Modal Berupa pembangunan Lahan Parkir sebesar **Rp.65.381.000,00,-**. Ada bangunan yang merupakan Hibah dari BPBD Provinsi Riau Berupa Shelter (Rumah Singgah Untuk Penanggulangan bencana) sebesar **Rp.1.394.877.954,01** dan Pada Tahun 2022 dimutasikan Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri hilir, sehingga tidak menjadi asset Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir lagi. Nilai Aset Gedung dan Bangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.1.063.352.800,00,-**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Des-21	Rp	%
- Gedung dan Bangunan	1.063.352.800,00	2.392.849.754,01	-1.329.496.954,01	-55,56

2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Selama Tahun 2022 terdapat mutasi atas nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, dikarenakan Aset Jembatan yang terletak di Kecamatan Tanah Merah dimutasikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir sebesar **Rp.3.754.231.900,00,-**. Sehingga nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 tetap sebesar **Rp. 567.112.750,00,-**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Des-21	Rp	%
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	567.112.750,00	4.321.344.650,00	-3.754.231.900,00	-86,88

2.5 ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah berupa Aset Buku dan Perpustakaan. Selama Tahun anggaran 2022 tidak terdapat mutasi atas nilai aset ini. Sehingga per 31 Desember 2022 nilai aset ini tetap ini menjadi sebesar **Rp.171.955.000,00**. Rincian Aset Tetap Lainnya serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel : Nilai Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	Saldo Per		Tambah (Kurang)
	31-Dec-22	31-Dec-21	Rp
Buku dan Perpustakaan	171.955.000,00	171.955.000,00	0,00
	171.955.000,00	171.955.000,00	0,00

2.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada akhir periode (tanggal neraca) belum selesai dibangun seluruhnya. Nilai Aset Kontruksi dalam Pengerjaan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.0,00,- (nol rupiah)**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Dec-21	Rp	%
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00

2.7 AKUMULASI PENYUSUTAN

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 20.246.711.075,66,-** ditambah dengan beban penyusutan selama Tahun 2022 sebesar

Rp.2.806.736.890,82,- Sehingga nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 23.337.578.200,89,-**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	30-Jun-22	31-Dec-21	Rp	%
Akumulasi Penyusutan	23.337.578.200,89	20.246.711.075,66	3.090.867.125,23	0,13

3. ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar atau aset tetap. Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat Aset Rusak Berat/Usang. Nilai Aset Lainnya milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar **Rp.415.024.202,00** dikurangi akumulasi penyusutan Aset Lain-lain (Rusak berat) **Rp.396.805.152,00** sehingga nilai aset lain-lain pada Neraca per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.18.219.050,00,-**. Adapun rincian masing-masing aset lainnya per tanggal 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel : Nilai Aset Lainnya pada Neraca

Aset Lainnya	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Dec-21	Rp	
- Aset Lain-lain	18.219.050,00	18.219.050,00		0,00
	18.219.050,00	18.219.050,00		0,00

II. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Jumlah Kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 5.548.815,00,-**.

1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek yang umumnya terdapat pada SKPD adalah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak memiliki kewajiban jangka pendek karena kewajiban tahun sebelumnya telah dilakukan pembayaran dan tidak ada tagihan atau kewajiban yang menjadi beban tahun anggaran 2022.

Tabel : Nilai Kewajiban Jangka Pendek pada Neraca

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Des-21	Rp	%
- Utang Perhitungan Pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
- Utang belanja	5.548.815,00	5.429.593,00	119.222,00	2,20
- Utang Jangka Pendek lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)

Utang PFK yaitu utang pemerintah daerah kepada pihak lain sehubungan dengan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti: PPh, PPN, iuran Taspen atau iuran Askes.

Seluruh Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak ketiga yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran untuk masa takwim 31 Desember 2022 telah disetor ke Kas Negara. Sehingga per 31 Desember 2022 tidak ada lagi pajak-pajak yang masih terutang dan belum disetor.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Des-21	Rp	%
- Utang Perhitungan Pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak memiliki kewajiban jangka pendek berupa Pendapatan Diterima Dimuka sehingga nilai akun ini per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp 0,- (nol rupiah)**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Des-21	Rp	%
- Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 UTANG BELANJA

Utang Belanja yaitu utang yang terkait dengan transaksi pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal yang sudah diterima namun belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Utang Belanja Jasa karena Tagihanair, listrik dan Internet Bulan Desember Tahun 2022 belum dilakukan pembayaran. Sehingga nilai kewajiban jangka pendek berupa Utang Belanja per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 5.548.815,00-**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Des-21	Rp	%
- Utang belanja	5.548.815,00	5.429.593,00	119.222,00	2,20

1.4 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak memiliki Utang Jangka Pendek Lainnya sehingga nilai akun ini per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp 0,- (nol rupiah)**.

Uraian	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Dec-21	Rp	%
- Utang Jangka Pendek lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

III. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Selama Tahun 2022 terdapat penurunan nilai ekuitas sebesar Rp.7.078.463.501,24,- dari tahun sebelumnya. Jumlah ini diperoleh dari penghitungan Ekuitas Awal sebesar Rp. 10.900.202.007,02,- dikurang Defisit LO sebesar Rp.9.851.411.245,39-, ditambah RK-PPKD sebesar Rp. 2.772.947.744,15,-. Sehingga diperoleh nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 3.821.738.505,78,-**.

Adapun penghitungan RK-PPKD pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI
1	SP2D UP	314.580.000,00
2	SP2D GU	3.349.543.735,00
3	SP2D TU	15120000
4	SP2D LS - GAJI	3.542.721.426,00
5	SP2D LS - BARANG DAN JASA	495.804.000,00
6	TOTAL SP2D (1 S/D 5)	7.717.769.161,00
7	SP2D GU NIHIL	
8	STS UP	1.674.957
9	STS GU / BELANJA	1000
10	STS TU	0
11	STS LS	0
12	MUTASI ASET	4.943.145.459,85
13	TOTAL STS + GU NIHIL (7 S/D 12)	4.944.821.417
	RK-PPKD DINAS (6 - 13)	2.772.947.744,15

Perbandingan Ekuitas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel : Nilai Ekuitas pada Neraca

Ekuitas Dana	Saldo Per		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Dec-22	31-Dec-21	Rp	%
- Ekuitas	3.821.348.285,78	10.900.202.007,02	-7.078.853.721,24	-0,65

A. DOMISILI DAN BENTUK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan perangkat daerah yang disertai wewenang tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan di bidang sosial khususnya dalam penanganan penanggulangan bencana.

Saat ini Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir beralamat di Jalan Swarna Bumi No. 03 Telp. (0768) 21984 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sesuai peraturan daerah, kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Sekretariat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Peraturan Daerah Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Tugas dan Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, diperbaharui dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

B. VISI, MISI DAN TUGAS POKOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir didukung Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terutama dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir dalam Pengembangan Mitigasi bencana di Kabupaten Indragiri Hilir dimana Kabupaten Indragiri Hilir sering terjadi bencana berupa Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan tiap tahunnya bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah memperkuat Sarana dan Prasarana dan dukungan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat mencegah dan menurunkan resiko bencana.

Visi Kabupaten Indragiri Hilir ***“Kejayaan Inhil yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat”*** BPBD Kabupaten Indragiri Hilir tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan Misi VI ***“Memantapkan Kerukunan, Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Kehidupan Sosial”***, serta dalam upaya pemenuhan capaian kinerja pada dasarnya kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai OPD pendukung penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga visi yang dicanangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

“Mewujudkan Indragiri Hilir Tangguh dalam Menghadapi Bencana “

Untuk mewujudkan visi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan tata kelola penanggulangan bencana.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.
3. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
4. Membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi

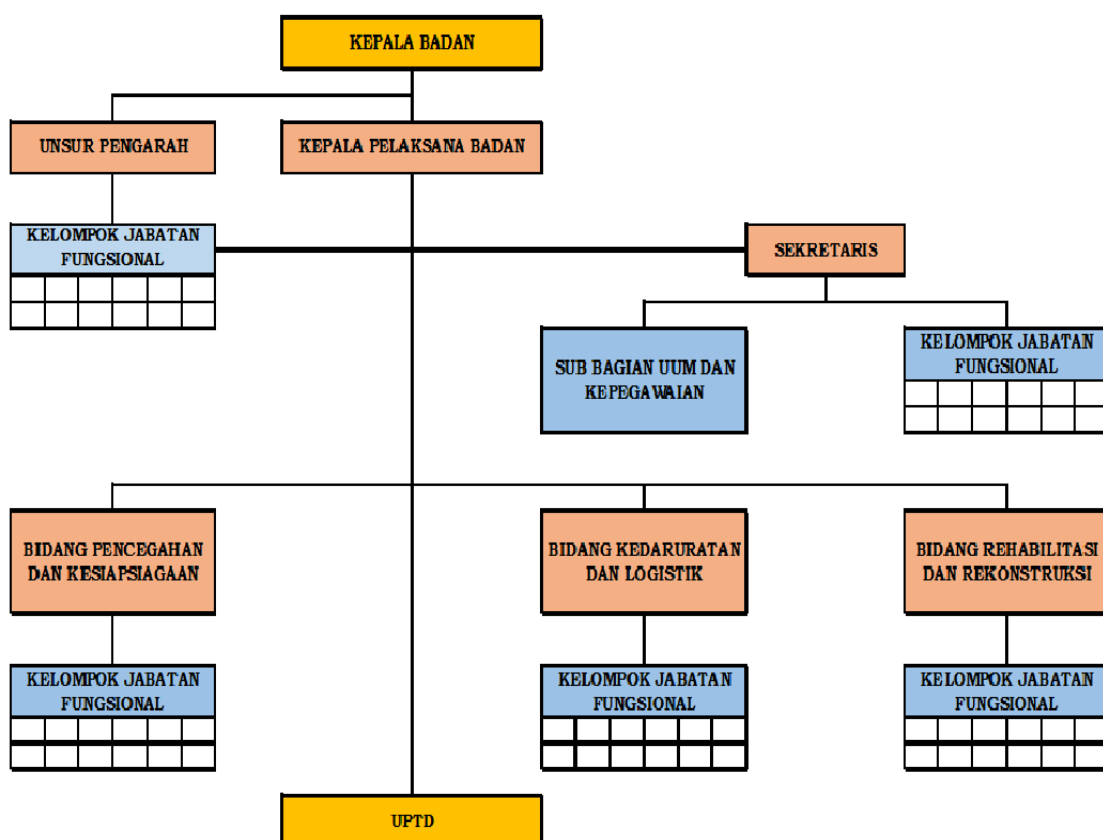
perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Menurut Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 1 orang Kepala Pelaksana Badan (Eselon II), 1 orang Sekretaris Badan (Eselon III), 3 Orang Kepala Bidang (Eselon III), 1 Orang Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (Eselon IV) dan 8 orang Pejabat Fungsional.

Adapun Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana Badan
- b. Sekretaris
- c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik
- e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan



D. PENGANTIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN SELAMA TAHUN BERJALAN

Selama periode Tahun Anggaran 2022, tidak terjadi penggantian manajemen pemerintahan didalam struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Indragiri Hilir Masih dipimpin oleh Bapak **YUSPIK, SH** selaku Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan pangkat dan golongan Pembina Utama Muda (IV/c). Dan didampingi Bapak **Drs. ERI YAWARDHANA** selaku sekertris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Laporan Keuangan Semester Pertama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas, tertib pengelolaan keuangan serta transparansi penggunaan anggaran suatu entitas pemerintahan khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain memuat unsur pokok laporan keuangan seperti Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, laporan yang kami susun ini juga memuat beberapa hal-hal penting berupa informasi non keuangan, antara lain seperti Informasi Kedudukan dan Tugas Pokok serta Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Semester Pertama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 yang dapat kami sampaikan. Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang lebih baik dan akurat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean goverment*). Akhirnya, kami berharap semoga Laporan Keuangan yang kami susun ini bisa bermanfaat baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal.

Tembilahan, 31 Desember 2022

Mengetahui,
KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

YUSPIK, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196406141996031003

LAMPIRAN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN

